

EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KOTA TOMOHON

**Citta Nadya Celine Wurara ¹, Stefanus Sampe ², Donald K. Monintja ³, Michael Mamentu ⁴,
Fanley N. Pangemanan ⁵, Steeva G. Rondonuwu ⁶**

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Sam Ratulangi

Correspondet author: cittawurara27@gmail.com

Manado, Sulawesi Utara, Indonesia

Abstract

This research aims to analyze and determine the effectiveness of implementing the Regional Government Information System (SIPD) in development planning in Tomohon City. This research adopted a qualitative descriptive research method and was conducted at the Bappelitbangda office in Tomohon City, North Sulawesi. The data used in this research comes from primary and secondary data. The data analysis technique used interactive data analysis. The research results show the effectiveness of the Regional Government Information System (SIPD) application in development planning in Tomohon City, this application is considered innovative and able to increase the efficiency of planning preparation because it is electronic-based and integrated with the centre and regions. However, there are several obstacles that need to be taken into account, such as effectiveness indicators not yet being met due to frequently changing legal bases, lack of regular outreach and training for human resources, and limited infrastructure. Although this application is very helpful compared to manual methods, it still requires better adjustments and support in order to achieve optimal effectiveness according to Duncan's theory in Steers (2012).

Keywords: Effectiveness; Development Planning; Implementation; Regional Government Information System (SIPD)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Perencanaan Pembangunan di Kota Tomohon. Penelitian ini mengadopsi metode penelitian deskriptif kualitatif dan dilakukan di pada Kantor BAPPELITBANGDA Kota Tomohon Sulawesi Utara. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder. Teknik analisis data digunakan analisis data interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam perencanaan pembangunan di Kota Tomohon, aplikasi ini dinilai inovatif dan mampu meningkatkan efisiensi penyusunan perencanaan karena berbasis elektronik dan terintegrasi dengan pusat dan daerah. Namun, terdapat beberapa kendala yang perlu diperhatikan, seperti belum terpenuhinya indikator-indikator efektivitas akibat dasar hukum yang sering berubah, kurangnya sosialisasi dan pelatihan rutin bagi sumber daya manusia, serta keterbatasan sarana prasarana. Aplikasi ini meskipun sangat membantu dibandingkan metode manual, masih membutuhkan penyesuaian dan dukungan yang lebih baik agar dapat mencapai efektivitas optimal sesuai teori Duncan dalam Steers (2012).

Kata Kunci: Efektivitas; Pelaksanaan; Perencanaan Pembangunan; Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

PENDAHULUAN

Memotret perkembangan zaman saat ini yang semakin maju khususnya dalam bidang teknologi berbagai aktivitas dilakukan bisa dimana saja dan kapan saja, hal ini tentunya bisa di katakan sangat memudahkan dalam bidang pemerintahan, kemajuan ini dapat di gunakan sebagai alat pemerintah untuk berkoordinasi antara pusat dan daerah dalam menyampaikan informasi, kemudian pemanfaatan yang di lakukan pemerintah yakni di adakannya E- government yaitu penggunaan jaringan internet dalam penyebaran informasi dan pelayanan pemerintah, manfaat dari E-government yaitu pertama mengurangi biaya, alasannya karena melalui sistem online, maka biaya administrasi dan sebagainya akan berkurang. Kedua, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas karena masyarakat dapat dengan mudah mengakses dan melihat sejauh mana kegiatan pemerintah sudah dilakukan (Iestari at al, 2021).

Peluncuran aplikasi yang kementerian dalam negeri yaitu sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) yang dimuat dalam Permendagri No 70 Tahun 2019 dapat dikatakan sebagai salah satu penjabaran dari tujuan perencanaan pembangunan nasional yaitu untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan, dan pengawasan, juga mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan menurut UU No 25 tahun 2004 tentang Pembangunan Nasional.

Sistem informasi pemerintahan daerah selanjutnya di singkat SIPD adalah sistem pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah yang berfungsi sebagai system pendokumentasian, pengelolaan dan pengolahan data perencanaan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada publik dan sebagai dokumen pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah. Tujuannya adalah untuk memanfaatkan data dan informasi pembangunan daerah dengan sebaik-baiknya yang langsung diwadahi oleh Bappelitbangda yang merupakan badan yang ada di tingkatan wilayah kota, kemudian untuk link aksesnya atau situs dapat diakses dalam <https://sipd.kemendagri.go.id/landing> dengan tampilan yang baru di update oleh kementerian. Bappelitbangda sebagai salah satu instansi pemerintah yang dituntut untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik yaitu dengan cara mempertanggung

jawabkan tugas dan fungsinya. Membantu walikota melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan dibidang perencanaan,pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah. Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik Bappelitbangda Kota Tomohon selaku unit perencanaan di haruskan menyusun Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana tahunan.

Maka dari itu, untuk membangun satu data Indonesia telah diawali pemerintah pusat dengan memberlakukan SIPD. di awali dari tingkat Provinsi Sulawesi utara ke Kota Tomohon, kemudian dari Pemerintah Kota berlanjut kepada tiap-tiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di perintahkan untuk segera menata dan menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 70 tahun 2019 tentang SIPD tersebut. Pemerintah Kota Tomohon mulai menerapkan SIPD pada tahun 2021 untuk merumuskan perencanaan pembangunan 2022, dengan diterapkan SIPD ini maka pemerintah diharapkan dapat memberikan data yang akurat dan akuntabel yang diperlukan dalam perencanaan pembangunan serta dapat digunakan stakeholder tingkat pusat, masyarakat umum serta dunia usaha.

Sebelum penggunaan SIPD, Bappelitbang mengalami kesulitan Dalam proses penyusunan data perencanaan yang menggunakan excel atau *Microsoft acces* yang datanya di *input* secara manual sehingga datanya tidak terpantau secara langsung. Pemerintah Kota Tomohon sempat menggunakan aplikasi perencanaan bernama SIAndaLTOM di tahun 2017 hingga 2018, kemudian Kementerian meluncurkan aplikasi berbasis website yaitu SIPD maka pemerintah Kota Tomohon beralih dari Aplikasi yang ada di daerahnya yaitu SiAndaLTom ke aplikasi dari Kemendagri yang dengan tujuannya yaitu suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja pemerintah. Peluncuran SIPD di tahun 2020 sebagai perbaikan dari metode penyusunan perencanaan pembangunan sebelumnya nyatanya masih memerlukan perhatian khusus seperti kemudahan akses pelatihan pengoperasian bagi pegawai instansi terkait sebagai penyesuaian transisi pengolahan data dari manual ke aplikasi berbasis *website* agar meminimalisir kesalahan dikemudian waktu. Adapun beberapa masalah yang ada yakni : Dalam penggunaan fitur *helpdesk* sebagai sarana pengajuan pertanyaan sering tidak direspon cepat sehingga memperlambat dalam penyusunan perencanaan, terdapat masalah juga dalam server yang ada di bagian Indonesia tengah dimana kelancaran aplikasi ada pada jam-jam tertentu server mulai down, selain itu pelatihan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia perlu diadakan rutin karna dibutuhkan keahlian yang cukup dalam mengoperasikan aplikasi SIPD karena penginputan harus berdasarkan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur.

Mengingat belum adanya penelitian yang membahas terkait Sistem Informasi Pemerintahan Daerah khususnya di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tomohon. Bebeapa alasan lain adalah dengan melihat terobosan baru yang ditawarkan oleh Kemendagri dalam hal membuat aplikasi bernama SIPD sejak tahun 2019 bertujuan untuk memuat data informasi pembangunan, informasi keuangan dan informasi lainnya yang terintegrasi di setiap daerah, kemajuan teknologi di era revolusi industry 4.0 pemerintah harus dengan sigap untuk menyesuaikan diri, dengan adanya inovasi kegiatan pemerintahan berbasis teknologi yang disebut E-government, aktivitas pemerintah dilakukan lewat platform digital.

Salah satu inovasi dalam meningkatkan perencanaan pembangunan yaitu dibuatnya SIPD atau sistem informasi pemerintahan daerah melihat terobosan baru yang dikeluarkan pemerintah tentunya harus dilihat juga keefektivan dari penerapan aplikasi ini, untuk melihat keefektivan penerapan aplikasi SIPD indikator pencapaian tujuan sangatlah penting karena dengan program yang telah dibuat tentunya mempunyai tujuan yang membawa kepada hal baik dengan memperhatikan waktu pencapaian yang ditentukan, pencapaian sasaran sebagai target kongkrit dan dasar hukum, program yang di rancang demi kelancaran perencanaan pembangunan dibutuhkan pengenalan akan program dan kerjasama disetiap SKPD dalam memperdalam pengetahuan atau penggunaan dari SIPD, kemudian adaptasi, adaptasi ini pun penting yaitu mencakup peningkatan kemampuan atau sumberdaya manusianya dalam pengoprasian SIPD dan sarana pra sarana penunjang keberhasilan perencanaan pembangunan melalui aplikasi berbasis website ini.

Atas dasar tersebut, penulis yakin untuk melakukan kajian dengan menggunakan teori Efektivitas yang dikemukakan oleh Duncan dalam steers (2012:53) dalam meneropong bagaimana Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan di Kota Tomohon Sulawesi Utara melalui aspek/indikastor pencapaian tujuan, integrase, dan adaptasi.

METODE

Dalam tulisan ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menjelaskan data sesuai dengan hasil penelitian yang dijabarkan melalui tulisan atau gambar dan bukan angka-angka sesuai dengan temuan peneliti. Menurut Moleong (2017:6). Lokasi penelitian dilakukan Kantor BAPPELITBANGDA Kota Tomohon Sulawesi Utara dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan di Kota Tomohon. Sedangkan waktu penelitian kurang lebih 3 bulan, dimulai pada awal maret 2024 sd awal mei 2024, yang diawali dengan proses observasi atau pengenalan awal pada lokasi penelitian. Informan dalam penelitian ini

adalah Kepala Badan Bappelitbangda Kota Tomohon, Kepala Bidang Monitoring dan Evaluasi, dan Operator Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kota Tomohon. Data primer yang diperoleh dari hasil wawancara, dan data sekunder penelitian bersumber dari buku, jurnal-jurnal, dan sumber lain serta beberapa data yang sudah tersedia di Kantor BAPPELITBANGDA Kota Tomohon. Data dari penelitian ini dievaluasi menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui pemanfaatan teknik observasi, interaksi wawancara, serta pengumpulan dokumen.

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan model interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai datanya jenuh, dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan Miles, Huberman & Saldaña (2014) dalam (Elwan et al., 2022). yaitu data dianalisis menggunakan tiga langkah, yaitu kondensasi data, penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (penarikan kesimpulan dan verifikasi). Kondensasi data mengacu pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data. (La Ode Muhammad Elwan et al., 2022)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan di Kota Tomohon

Untuk menjawab permasalahan penelitian, penulis tetap berpedoman pada kerangka pikir penelitian sebagai ruang lingkup atau batasan penelitian dengan menggunakan teori Efektivitas yang dikemukakan oleh Duncan dalam steers (2012:53) dalam menepong bagaimana Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan di Kota Tomohon Sulawesi Utara melalui aspek/indikator pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi.

Data temuan penelitian yang bersumber dari hasil wawancara, observasi dan keseuaian dengan teori yang digunakan merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi sebagai hasil penelitian ini. Olehnya itu, pada data-data hasil penelitian yang peneliti temukan yang bersumber dari data primer dan sekunder, kemudian dibahas secara detil dan dapat mewakili seluruh temuan penelitian berdasarkan indikator/ aspek Efektivitas yang dikemukakan oleh Duncan dalam steers (2012:53).

1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan menurut steers adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari indikator, yaitu kurun waktu pencapaian ditentukan, pencapaian sasaran target kongkrit dan dasar hukum.

Berkaitan dengan efektivitas penerapan aplikasi sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) dalam perencanaan pembangunan kota Tomohon, berdasarkan pernyataan dari 3 pegawai Bappelitbangda bahwa setelah adanya aplikasi SIPD mereka sangat terbantu dalam tahapan perencanaan pembangunan di kota Tomohon, dalam pencapaian tujuan yaitu untuk kurun waktu yang ditentukan oleh SIPD tidak menjadi masalah karena mereka memiliki strategi dalam mencegah server down adalah dengan membuat batasan waktu penginputan kepada perangkat daerah 1 minggu sebelum batas waktu yang ditentukan oleh SIPD, namun ada indicator ke 2 yang masih dirasa kurang baik untuk menunjang proses perencanaan yaitu dasar hukumnya yang mengatur Kodefikasi, klasifikasi dan nomenklatur berubah-ubah secara cepat sehingga dari pihak Bappelitbangda khususnya bagian Monev (monitoring dan evaluasi) dan operator sulit untuk menyesuaikan dikatakan karena aturan hukum yang sebelum yang mengatur satuannya dalam sub kegiatan berubah setelah ada perubahan aturan dan sampai saat ini sudah ada 3 kali turunan aturan Kepmen (keputusan menteri) yaitu Kepmen 050- 3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, Kepmendagri 050- 5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, Kepmendagri 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang perubahan atas Keputusan dalam negeri nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi, dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Keterbatasan akses komunikasi dari pusat dan daerah membuat terhambatnya penyusunan perencanaan dalam SIPD ada tools *helpdesk* yang bertugas sebagai media tanya jawab antar operator pusat dan daerah namun keluhan terjadi karena kurang cepatnya respon dalam menjawab keluhan dari daerah.

Pencapaian tujuan di katakan berhasil apabila dalam proses tahapannya mendukung untuk tercapainya tujuan, salah satu indicator yang tidak berjalan dengan baik dapat menghambat keberhasilan dari suatu tujuan. SIPD adalah aplikasi yang dibuat oleh kementerian dalam negeri tergolong masih baru perlu adanya persiapan yang matang dan perlu adanya konsistensi dalam menentukan satuan dalam sub kegiatan karena melihat sudah ada 3 kali turunan dengan waktu yang cepat, membuat daerah kebingungan dalam tahapan perencanaan karena bisa dibayangkan saja dari daerah baru mau belajar mengenai penggunaan aplikasi SIPD dan setelah sudah cukup mahir namun setelah itu dirubah, hal ini memang harus juga di barengi dengan kemampuan dari Bappelitbang dalam penyesuaian dengan perubahan yang terjadi.

Hal tersebut akan selalu menghambat pencapaian tujuan karena adanya perubahan kemendagri yang begitu cepat yang berkaitan dengan dasar hukum sebagai salah satu indikator tercapainya tujuan.

2. Integrasi

Integrasi, yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk melakukan kegiatan dari program kerja yang telah disepakati dan mengadakan sosialisasi dengan pihaklain. Integrasi terdiri dari indikator, yaitu prosedur dan proses sosialisasi.

Prosedur yang menjadi salah satu indikator dari integrasi dijalankan berdasarkan permendagri no 86 tahun 2017 yang menjadi acuan dari Bappelitbang, saat ini Bappelitbang berada pada perencanaan penyusunan RPJPD (rencana pemerintah jangka panjang daerah) dan RKPD (rencana kerja pemerintah daerah) yang bolanya saat ini sudah ada pada TAPD (tim anggaran pemerintah daerah) dari tahapan yang dilakukan yaitu musrenbang kelurahan, kemudian masuk ke kecamatan untuk dipilah usulan mana yang akan di teruskan tahapan selanjutnya usulan yang sudah di tentukan akan masuk otomatis ke perangkat daerah atau dinas yang dituju, secara prosedural sudah dilakukan dengan tahapan yang benar namun didapati ketidaksesuaian dimana ada dinas yang telah menerima usulan dari musrenbang kelurahan dan pikir namun dibuat nol atau tidak dianggarkan, hal ini tentunya perlu koordinasi antar Bappelitbang dan dinas terkait agar tetap mengawal usulan dari kelurahan dan pikir yang sudah di pilih sebagai rencana pembangunan, jangan sampai mengecewakan masyarakat yang sudah mengusulkan dan berharap usulannya sudah diakomodir.

Dalam proses sosialisasi menjadi aspek penunjang untuk mengenal sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) lebih dalam dan dapat membuat perencanaan lebih matang, dengan adanya aplikasi berbasis website ini membuat SKPD harus mahir dalam mengoperasikan komputer, ada perubahan yang dikenal dengan SIPD merah kemudian SIPD biru, yang dengan kata lain sistem informasi pemerintahan daerah ini terus update mengikuti perkembangannya, dan untuk penyesuaiannya Bappelitbang harus dengan sigap mensosialisasikan perubahan yang ada, berdasarkan wawancara penyelenggaraan sosialisasi saat ini telah dilakukan tapi tidak rutin, dilihat dari waktu penggunaan SIPD baru 4 tahun proses sosialisasi sangat di butuhkan agar tidak terjadi kesalahan dalam penginputan perencanaan, dengan contoh kasus yang dialami oleh salah satu dinas memperlihatkan harus adanya sosialisasi yang rutin dan koordinasi yang baik antar perangkat daerah dengan Bappelitbang sebagai wali data.

3. Adaptasi

Adaptasi erat kaitannya dengan penyesuaian terhadap hal- hal yang baru, bentuk penyesuaian yang harus diperhatikan pemerintah kota Tomohon adalah terobosan pemerintah pusat dalam hal upaya pengembangan pelayanan bidang teknologi atau yang

dikenal e government atau pemerintah digital yang menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik, dengan adanya aplikasi ini dapat membuat tugas dari pemerintah kota Tomohon akan lebih efisien.

Penunjang keberhasilan dari perencanaan pembangunan dilihat dari indikator adaptasi yaitu yang pertama mengenai kemampuan sumber daya manusia dalam penguasaan sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD), semenjak beberapa tahun berjalan Bappelitbang sudah mulai bisa menyesuaikan dan paham mengoperasikan SIPD dengan mengikuti panduan dari permendagri dan Kepmendagri, yang harus terus dipertahankan dari adaptasi aplikasi ini yaitu pegawai- pegawai yang sudah di beri tugasnya dalam membuat program harus berlatih terus dalam mengoperasikan SIPD dan dalam hal penyusunan perencanaan harus detail dan akurat, karena dalam penyesuaiannya aplikasi ini dianggap sangat kompleks sehingga kemampuan atau ahli komputer tidaklah cukup harus memiliki kemampuan analisa dalam perencanaan pembangunan agar pengadministrasian dalam SIPD menghasilkan produk yang benar-benar berkualitas.

Pengadaptasian yang kedua yaitu berbicara mengenai sarana dan pra sarana, keunggulan dari E- government atau elektronik government adalah teknologi berbasis elektronik yang dapat mengakses data dimana saja dan dengan jangkauan yang jauh bermodalkan alat elektronik laptop dan tap ditambah dengan akses jaringan wifi/ data yang kuat sehingga untuk memonitoring mengevaluasi bahkan mengontrol bisa dilakukan secara fleksibel, namun berdasarkan pengamat dari peneliti untuk pendukung dalam pengoperasian SIPD berupa laptop yang digunakan oleh operator tidak lagi layak dan perlu diganti dengan yang lebih update, penganggaran untuk pengadaan alat elektronik pendukung pun harus di sediakan oleh BAPPELITBANG Kota Tomohon Sulawesi Utara.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang efektivitas aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam perencanaan pembangunan di Kota Tomohon, aplikasi ini dinilai inovatif dan mampu meningkatkan efisiensi penyusunan perencanaan karena berbasis elektronik dan terintegrasi dengan pusat dan daerah. Namun, terdapat beberapa kendala yang perlu diperhatikan, seperti belum terpenuhinya indikator-indikator efektivitas akibat dasar hukum yang sering berubah, kurangnya sosialisasi dan pelatihan rutin bagi sumber daya manusia, serta keterbatasan sarana prasarana. Aplikasi ini meskipun sangat membantu dibandingkan metode manual, masih membutuhkan penyesuaian dan dukungan yang lebih baik agar dapat mencapai efektivitas optimal sesuai teori Duncan dalam Steers (2012).

DAFTAR PUSTAKA

- BN. 2019. Peraturan menteri dalam negeri. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/127924/permendagri-no-70-tahun-2019> (25/9/2019)
- Deseverians, R dan Wulandari, S. 2020. *Efektivitas system informasi pemerintahan daerah (SIPD) dalam perencanaan pembangunan tahunan daerah dikota Pontianak provinsi Kalimantan Barat*. Administrasi pemerintahan daerah: 13-30.
- Donnelly, G. I. 1985. *Organisasi. Jilid I*. Erlangga. Jakarta.34 hal.
- Dunn, William. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Edward III and George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press. Washington USA.
- Ekaputra, N. D. 2021. *Efektivitas Penerapan aplikasi Sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) dalam penyusunan dokumen RKPD DI Kabupaten Nganjuk*. Universitas Islam Kadiri. Magister Manajemen, program Pascasarjana.62-79.
- Kumorotomo, W. 2005. *Akuntabilitas Birokrasi Publik*. MAP UGM dan Pustaka Pelajar. Yogyakarta.362 hal.
- Kurniawan, Agung. 2005. *Tranformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta:Pembaharuan
- La Ode Muhammad Elwan, Muhammad Yusuf, & La Ode Herman Halika. (2022). MINING POLICY CONFLICT: Recruitment of Local Workers in Morosi Industrial Estate, Konawe Regency, Southeast Sulawesi. *Journal Publicuho*, 5(3), 626–642. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.18>
- Lubis, S.M & Husein Martani. 1987. *Teori Organisasi: Suatu Pendekatan Makro*. Jakarta: Pusat Antar Unoversitas Ilmu-Ilmu Sosial
- Moleong, L. J. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi 36. Remaja Rosdakarya Offset. Bandung.6 hal.
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta:UPP AMP YKPN
- Pasolong, H. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta. Bandung.4 hal.
- Pasolong, Harbani. 2013. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Peraturan Menteri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- Peraturan menteri no 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah
- Setiawan, G. 2004. *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Soehardi, S. 2003. *Perilaku Organisasi*. BPFE UST. Yogyakarta.2 hal.
- Soewarno, Handyaningrat. 2006. *Pengantar Studi Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung
- Steers, Richard M. 2012. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta. Erlangga.
- Sudianing, N. K dan Seputra, K. A. 2019. *Peran system informasi pemerintahan daerah dalam menunjang peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah*. Locus majalah ilmiah FISIP. 112-133.
- Sugiyono, 2013, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. (Bandung: ALFABETA).
- Usman, N. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Raja Gravindo Persada. Jakarta.
- Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- Undang-undang no 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional